

ANALISIS KEMAMPUAN PUBLIC SPEAKING ANGGOTA DPRD KOTA MAKASSAR MASA BAKTI 2009-2014

Irwani Pane

Abstract

This research has aimed : 1) to analyze the knowledge level of public speaking for DPRD Member of Makassar City; 2) to analyze the public speaking skills for DPRD Member of Makassar City; 3) to analyze the public speaking personality for DPRD Member of Makassar City in playing the part of self as professional political communicator. This research has carried in DPRD Office of Makassar City South Sulawesi, between May until August 2010. Procedural of research by analyzing data descriptively that resulted from *in-depth interview* and observation on researched respondents. The technique to choose respondents by *purposive sampling* where respondents determined accord with the given criteria which made accord with the purpose of research. Result of research showed that knowledge level of public speaking for DPRD members inversely proportional to the knowledge ability to speak in front of public. Then, skills level particularly in communicate of DPRD members tend to emotional and frequently high voice tone, this matter influenced by individual character which temperament and Buol political-interest in term the personality level for largely DPRD members of Makassar City is considered less attention for attitude and good behavior in court before speak in front of public.

Keywords: Public Speaking, Ability, Communication Skill.

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat pengetahuan tentang kemampuan berbicara didepan umum (public speaking) para anggota DPRD kota Makassar, kemampuan dan keterampilan public speaking, serta kepribadian dalam berpidato (public speaking) masing-masing anggota dalam memerankan dirinya sebagai komunikator politik yang profesional. Penelitian ini dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Makassar propinsi Sulawesi Selatan, antara Mei sampai Agustus 2010. Prosedur penelitian dengan menganalisis data secara deskriptif yang hasilnya diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan langsung terhadap responden yang diteliti. Teknik pemilihan responden dengan cara purposive sampling dimana responden ditetapkan menurut kriteria sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan public speaking DPRD Kota Makassar memiliki proporsi terbalik, lalu tingkat keterampilannya dalam berkomunikasi (public speaking) dalam rapat-rapat cenderung emosional dan sering kali dengan suara yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh karakter dan temperamen individu yang didasari atas kepentingan politik sebagian besar anggota dewan.

Kata Kunci: Public Speaking, Kemampuan, Keterampilan Komunikasi

Pendahuluan

Public Speaking adalah kegiatan di depan publik. Tampil di depan publik untuk sekarang ini tampaknya menjadi bagian dari cat dan gaya hidup. Dalam kerangka pikir Maslow, barangkali ini bisa dikategorikan sebagai akhir atau puncak dari pengaktualisasian diri. Diakui atau tidak,

kebutuhan akan aktualisasi diri ini menjadi kebutuhan semua orang. Semua orang ingin dirinya bisa mengaktualisasi: ingin dirinya diterima oleh publik.

Persoalannya, walaupun tiap orang menginginkan semua itu, namun tidak semua orang tahu dan paham, bagaimana mengaktualisasikan dirinya melalui pidato.

Pada kenyataannya, ada orang yang demikian merasa bangga dengan Citra diri dan pembicaraan yang telah ditampakkan tetapi adapula orang yang tidak merasa bangga dengan Citra dirinya sendiri, tidak pula bisa bangga dengan apa yang menjadi pembicaraannya. Untuk terakhir ini, ia sesungguhnya ingin tampil didepan publik dengan cara mengagumkan dan mempesona, tetapi apalah daya, pengetahuan, wawasan dan pemahaman tidak dimilikinya secara baik.

Ada juga jenis orang yang benar-benar merasa tidak punya nyai untuk menampilkan Citra dirinya sekaligus tampil sebagai seorang pembicara. Dia terbakar oleh ketakutan yang dimunculkannya sendiri. Di hadapan banyak orang, dia terkapar dalam kecemasan dan kekhawatiran. Sungguh, dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, menjadi Orang yang mampu menampilkan Citra diri secara positif adalah amat penting dan amat sangat bermanfaat.

Pada saat yang sama, menjadi pembicara yang baik, berpengalaman, berpengetahuan juga amatlah penting. Tidak ada keburukan apapun apabila anda bisa menampilkan Citra diri yang positif sekaligus mampu tampil sebagai seorang pembicara yang mengagumkan dan mempesona. Akan tetapi, niscaya ada keburukan disamping juga kebaikan disamping juga ada kebaikan apabila anda tidak mau menampilkan Citra diri yang positif sekaligus tampil menjadi pembicara publik.

Dengan membaca beberapa kasus peristiwa komunikasi politik yang berhubungan dengan *public speaking* dari berbagai sumber memunculkan masalah berbagai masalah. Pada satu sisi, dalam peristiwa

komunikasi politik diharapkan komunikator menerapkan kesantunan berbahasa. Hal itu tampak dalam komunikasi politik, sebagai contoh, Gus Dur: rapat gabungan Komisi II dan III dengan jajaran Kejaksaan pada 17 Februari 2005 (Kompas, 18 Februari 2005); rapat dengar pendapat antara Komisi VII dan Jajaran Direksi Baru Pertamina pada 10 Februari 2009. Memanasnya situasi antara dua pihak itu bukan karena perdebatan masalah substansi yang dibicarakan, tetapi lebih karena kurang piawainya komunikator politik dalam menggunakan bahasa sehingga pihak lain menjadi sangat tersinggung. Pada sisi lain, kesantunan dalam komunikasi politik oleh sebagian pihak dianggap sebagai belenggu komunikasi seperti tampak pada berbagai komentar atas peristiwa debat capres dan cawapres 2009. Berdasar hal itu, ada kontradiksi penggunaan aspek kesantunan berbahasa dalam beberapa contoh peristiwa komunikasi politik di atas (Katubi, 2009).

Kasus Pansus Century (2009) sejak dibentuk hampir semua pengonsumsi media massa mendapat menu “*Realty Show*” bercita rasa semaya. Forum pemeriksaan saksi untuk menungkap kasus Century, sejak awal berbalut intrik, ketegangan serta perdebatan dari hal yang substansial hingga artifisial. Ditengah gegap-gempitanya isu ini, mulai terasa ada hal yang mengusik keadaan publik terutama menyangkut etika komunikasi yang dipertontonkan secara langsung dari panggung pansus yang terhormat.

Dalam praktiknya, sejumlah indikasi mengarah kuat pada minimnya penghormatan anggota Pansus terhadap etika komunikasi. Proses produksi pesan

verbal dan non verbal yang tidak relevan bahkan kontraproduktif dengan kehormatan anggota dewan serta tugas dan fungsi Pansus. Misalnya, kata-kata seperti “bangsat”, “setan”, “kodok” atau bentakan dan hardikan kasar diluar substansi persoalan membuat kita terperanjat dan bertanya, dimanakah letak keadaan mereka di depan publik. Tidak hanya kata-kata verbal, banyak pula bahasa non verbal yang “nyinyir”, merendahkan bahkan bernuansa SARA dalam konteks tempat Diana pesan non verbal itu diproduksi dan didistribusikan kepada khalayak (Gun Heryanto, 2010)

Graber (1976) telah menemukan paling tidak ada lima fungsi bahasa politik. *Pertama*, fungsi informasional, yaitu pemberian fakta dan pemunculan konotasi dengan menggunakan kata-kata indah seperti “negeri yang makmur” atau “bapak pendiri bangsa”. Kata-kata dan rasa dalam dunia politik bisa membawa inferensi dan makna simbolik yang membantu pencapaian tujuan komunikator. *Kedua*, agenda setting, yaitu sebuah proses dimana komunikator mencoba mengidentifikasi dirinya dengan isu yang berkembang. *Ketiga*, interpretasi dan penghubungan, yang mengacu pada konstruksi dan penstrukturan pola makna dan asosiasi yang lebih luas. *Kempat*, proyeksi masa lalu dan masa depan (tradisi dan kontinuitas). *Kelima*, stimulasi tindakan fungsi “mobilisasi” dan “pengaktifan” bahasa.

Paparan diatas menunjukkan bahwa Public Speaking merupakan unsur penting dalam komunikasi politik disamping aspek komunikator, pesan, media, khalayak dan efek. Selain itu, bahasa juga menjadi salah satu bagian penting dalam kajian

komunikasi politik karena penggunaan bahasa komunikator politik memiliki efek domino sampai pada unsur tingkat keterpilihan seseorang di lembaga legislatif maupun lembaga kepresidenan. Terbaikannya unsur kesantunan berbahasa layak dibahas dalam kajian komunikasi politik.

Kajian penelitian ini berusaha memetakan dan menganalisis kemampuan public speaking seperti dikonseptualisasikan komunikator politik profesional sebagai seorang politisi (Dan Nimmo, 1978). Politisi profesional yang biasa ditampilkan legislator perlu dikaji secara mendalam dari aspek pengetahuan, keterampilan dan keterampilan. Untuk itulah fokus penelitian diarahkan lebih spesifik lagi dengan mengambil obyek penelitian anggota DPRD Kota Makassar Masa Bakti 2009-2014. Alasan mendasar pengambilan objek penelitian legislator kota Makassar, tidak hanya berdasarkan pertimbangan pendidikan dan latar belakang pengetahuan dan etika, tetapi karena legislator Kota Makassar dapat menjadi indikator barometer komunikasi politik profesional (baca : public speaking) dalam menggambarkan sosok perannya sebagai wakil rakyat. Dari pengamatan peneliti terhadap potret anggota legislatif Makassar menunjukkan pencitraan public speaking baik dari segi pemilihan kata dan kalimat maupun dari sisi komunikasi nonverbal tidak mencerminkan komunikator profesional.

Dari pemetaan sosok anggota legislator kota Makassar, kondisi masa bakti 2009-2014, diketahui dari 50 orang anggota dewan yang memiliki latar belakang Strata dua (S2) sebanyak 14 orang (28,00%) dan (S1)

sebanyak 27 orang (54,00%), Diploma sebanyak 4 orang (8,00%) dan SMU sebanyak 5 orang (10,00%). Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar dari Anggota DPRD Kota Makassar cukup memadai hal ini dapat dilihat 54% lulusan S1 dan 28% lulusan S2. Disisi lain tingkat pendidikan Anggota DPRD Kota Makassar masih kurang hal ini dapat dilihat bahwa masih ada anggota DPRD Kota Makassar memiliki latar belakang Diploma 4 orang (8,00%) dan SMU sebanyak 5 orang (10,00%).

Berdasarkan latar belakang pekerjaan dari 50 orang anggota DPRD sebelum menjadi anggota DPRD Kota Makassar terdiri ada pengusaha sebanyak 19 orang (38%), Purnawiran sebanyak 9 orang (18%) pensiunan PNS sebanyak 16 orang (32%) Akademisi sebanyak 6 orang (12%). Dari data tersebut diketahui bahwa sebagian besar Anggota DPRD memiliki latar belakang Pengusaha.

Adapun jabatan anggota DPRD pada partai politik sebagai kontestan Pemilihan Umum tahun 2010 yaitu ketua DPD sebanyak 8 orang (16%) Wakil Ketua DPD sebanyak 7 orang (14%), sekretaris sebanyak 14 orang (28%) bendahara sebanyak 17 orang (34%) dan anggota sebanyak 4 orang (8%). Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar anggota dewan memiliki jabatan sebagai bendahara partai politik.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar anggota dewan memiliki jabatan sebagai bendahara partai politik, sementara realitas DPRD Kota Makassar sebagian melakukan public speaking belum memenuhi standar retorika,

hal ini nampak dalam berbicara anggota dewan menunjukkan kemampuan mendelivery atau penyampaian di dan gagasan masih perlu di optimalkan.

Berikut kasus public speaking yang pernah terjadi di gedung DPRD Kota Makassar Masa Bakti 2009-2011 sebagai berikut :

A = jangan sepihak (dengan nada tinggi)

B = bukan sepihak

A = tunggu dulu pak ketua, masa dikurangi siapa yang suruh, saya tidak setuju dengan pendapat

saudara “B”

C = seandainya usul D dipaksakan saya bubar berhenti jadi anggota dewan.

Dalam sidang tersebut, salah satu anggota dewan (B) melontarkan pernyataan sambil berdiri dan kemudian dilanjutkan dengan duduk sambil merokok (terlampir gambar di halaman lampiran), mungkin ini yang membuat salah satu (A) merasa terlecehkan dan mengeluarkan statemen terakhir tadi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat pengetahuan public speaking anggota DPRD Kota Makassar ?
2. Bagaimana keterampilan public speaking anggota DPRD Kota Makassar ?
3. Bagaimana kepribadian public speaking anggota DPRD Kota Makassar dalam memerankan

dirinya sebagai komunikator politik yang profesional ?

Kajian Konsep dan Teori

Public Speaking dan Komunikasi Politik

Public Speaking adalah kegiatan berbicara di depan umum. Tujuannya adalah menyatakan pikiran, pendapat, ide dan gagasan atau guna memberikan gambaran tentang satu hal. *Public Speaking* biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk membangun opini, mengkomunikasikan kebijakan, memprovokasikan massa, menjual produk, meyakinkan klien, memberikan informasi dan lain-lain. Pendapat lama mengatakan bahwa pidato dianggap sebagai seni yang dapat dilakukan dengan baik oleh orang yang berbakat saja. Orang yang dikaruniai bakat berpidato memang ada dan jumlahnya tidak banyak. Namun, bakat saja tanpa disertai upaya belajar dan berlatih tidak akan berkembang.

Bahasa *Public Speaking* adalah Bahasa untuk berbicara kepada orang banyak. Bahasa yang tidak diperoleh sejak lahir. Bahasa yang dikuasai oleh sebagian besar dari kita. Itulah sebab utama, mengapa banyak sekali orang mengalami rasa gugup dan takut saat harus berbicara di depan orang banyak. Saat harus melakukan *Public Speaking*. Rasa gugup dan takut, yang muncul karena tidak terbiasa dan tidak pernah secara sengaja memahami dan mempelajari fenomena *Public Speaking*.

Padahal hampir setiap orang akan tampil sebagai *public speaker*, diberbagai dalam hidupnya. Di dalam dunia politik, di kantor sebagai pemimpin, di sekolah sebagai aktivis, di organisasi sebagai aktivis dan

pengelola, sebagai pebisnis, penjual dan sebagai profesional.

Public Speaking atau berbicara di depan umum sudah sangat tua usianya. Para Rasul menyampaikan risalah kenabian kepada umatnya melalui media ini. Demikian pula, Rasulullah Muhammad *shalallahu 'alaihi wa salam* menggunakannya untuk berda'wah menyampaikan wahyu Allah maupun pesan-pesan agama. Dari dulu sampai sekarang *Public Speaking* masih menjadi salah satu bagian kebudayaan umat manusia yang cukup dominan dalam menyampaikan informasi, menjelaskan ide-ide, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. (Rasyid, 2005)

Menurut Rakhmat (2008) bahwa *public speaking* dikonseptualisasikan sebagai berikut : Ucapan yang tersusun baik dan ditujukan kepada orang banyak. Kepandaian berpidato sering disebut dengan *retorika* atau *orator*, sedang orangnya disebut dengan *rhetor* atau *orator*. Berpidato merupakan seni percakapan yang didukung dengan penggunaan bahasa yang baik dan wawasan keilmuan yang luas. Berpidato dalam dunia pesantren sering disebut dengan *khithabah* dan orangnya disebut dengan *khatib*. Kita dapat melihat orang yang cakap dalam berpidato dalam forum-forum kenegaraan, pengajian, ceramah, diskusi, debat, kampanye, pelatihan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *public speaking* adalah proses berbicara kepada sekelompok orang yang dilakukan secara sengaja serta ditujukan untuk menginformasikan, mempengaruhi atau menghibur pendengar.

Public speaking memiliki beberapa

komponen yang berkaitan seperti Motivasi berbicara, kepemimpinan/pengembangan pribadi, bisnis, layanan pelanggan, komunikasi kelompok besar dan komunikasi massa. *Public speaking* bisa menjadi alat yang jitu jika digunakan untuk keperluan seperti memotivasi, mempengaruhi, membujuk, menginformasikan, menterjemah atau sekedar menghibur.

Apakah *Public speaking* adalah persoalan bakat ? Setiap orang memiliki bakat atau tidak sama-sama memiliki kesempatan untuk bisa berbicara di depan public. Soal, bagaimana orang tersebut mau belajar dan berlatih dan mengembangkannya. Ataukah, dapatkah orang yang pendiam (introvert) menjadi pembicara yang ulung ? Tentu saja bisa. Pendiam hanyalah soal pembawaan. Banyak pemimpin yang berpembawaan diam, namun saat berorasi berapi-api dan mampu mengorbankan semangat.

Pengertian *Public speaking* yang dikemukakan oleh Hardiansyah (2003) adalah : keterampilan yang dapat dilatih, dipraktikkan dan dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan audience, antara lain untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk dan mempengaruhi orang lain, mencapai saling pengertian dan kesepakatan, meraih promosi jabatan, mengarahkan kerja para staf, meningkatkan penjualan produk/keuntungan bisnis dan membagikan pengetahuan yang dimiliki seseorang.

Untuk beberapa alasan, ketika orang berpikir tentang pidato membayangkan sebuah situasi Diana seseorang yang sangat terlatih sedang berbicara, menguasai forum, berbicara dengan dinamis dan menyampaikan berbagai hal yang berpotensi

merubah hidup seseorang atau bahkan ribuan orang.

Sementara itu, berdasarkan praktisi perpidato, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Mengorganisasikan ide-ide
2. Menentukan konteks dan menganalisis audience
3. Mengadaptasi pesan sesuai keinginan dan kebutuhan khalayak
4. Memilih cara efektif dan memetakan sketsa pikiran
5. Menyampaikan pesa
6. Dan, menyimak umpan balik

Retorika

Retorika berasal dari bahasa latin rhetorica yang berarti ilmu bicara.. Retorika dalam arti sempit adalah mengenai bicara, sedangkan pengertian luasnya adalah penggunaan bahasa, bisa lisan maupun tulisan. Ada juga yang mengartikan retorika adalah *Public speaking* di depan umum. Bahkan ada asumsi beranggapan, retorika tidak hanya berada di depan umum, tetapi juga termasuk seni menulis. Kedua asumsi tersebut adalah benar, sebab retorika masih berkisar pada seni menggunakan bahasa dalam proses komunikasi di depan publik.

Para ahli berpendapat, retorika lahir sejak manusia ada. Akan tetapi, retorika sebagai seni bicara yang dipelajari yang dimulai pada abad kelima sebelum masehi, ketika kaum sofis Yunani mengembara dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mengajarkan pengetahuan mengenai politik dan pemerintahan dengan penekanan

terutama pada kemampuan berpidato. Maka berkembanglah seni pidato yang membenarkan pemutarbalikan demi tercapainya tujuan. Kaum sofis berpendapat bahwa manusia adalah “makhluk yang berpengetahuan dan berkemauan”. Manusia mempunyai penilaian tersendiri mengenai baik-buruknya sesuatu dan mempunyai etikanya sendiri. Tokoh aliran sofisme ini adalah Georgias (480-370 SM) yang dianggap sebagai guru retorika yang pertama dalam sejarah manusia. Filsafat mazhab sofisme ini dicerminkan oleh Georgias yang menyatakan bahwa kebenaran satu pendapat hanya dapat dibuktikan jika tercapai kemenangan dalam pembicaraan.

Pendapat Georgias ini berlawanan dengan pendapat Protagoras (500-432 SM) dan Socrates (469-399 SM). Protagoras mengatakan bahwa kemahiran berbicara bukan demi kemenangan, melainkan demi keindahan bahasa. Sedangkan bagi Socrates, retorika adalah teknik dialog untuk mencapai kebenaran. Seseorang yang sangat dipengaruhi oleh Socrates dan Georgias adalah Isocrates yang pada tahun 392 SM mendirikan sekolah retorika dengan menitik beratkan kepada pidato-pidato politik.

Pendapatnya yang sama dengan Isocrates, bahwa retorika memegang peranan penting bagi seseorang adalah Plato. Dan murid Socrates yang paling terkenal adalah Plato. Dan Plato mengatakan, retorika bertujuan memberikan kemampuan menggunakan bahasa yang sempurna dan merupakan jalan bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan dalam terutama dalam bidang politik.

Tokoh retorika lain pada zaman Yunani Eti

adalah Aristoteles yang sampai sekarang banyak dikutip pendapatnya. Berlainan dengan tokoh-tokoh lainnya yang mengatakan retorika sebagai seni, Aristoteles memasukannya sebagai bagian dari filsafat. Selanjutnya, Aristoteles berkata bahwa keindahan bahasa hanya dipergunakan untuk empat hal, empat hal, yaitu bersifat : (1) Membenarkan (Corrective), (2) Memerintahkan (Instructive), (3) Mendorong (Suggestive), (4) mempertahankan (Defensive).

Sementara itu, seorang tokoh retorika Cicero meningkatkan kecakapan retorika menjadi satu ilmu. Cicero mengajarkan bahwa dalam mempengaruhi khalayak, maka seorang retor harus meyakinkan pendengarnya dengan mencerminkan kebenaran dan kesusilaan.

Jika, memperhatikan tradisi retorika, kita akan mengacu pada Grand theory yang mempengaruhi pandangan konseptual ketika berbicara tentang *Public speaking*. Berdasarkan ide tradisi retorika maka kita tidak melepaskan diri hukum retorika yang diproklamirkan Aristoteles. Bahkan dalam buku Littlejohn (2005) yang membahas tradisi yang berlaku dalam disiplin ilmu komunikasi, memasukkan tradisi retorika dari 5 (lima) tradisi *komunikasi* yang berlaku saat ini.

Dari kelima karya agung retorika diperkenalkan sejak zaman pidato Yunani dan Roma telah meringkaskan 5 perspektif retorika (Littlejohn, 2005, hal 50-51), yaitu; *Invention, arrangement, style, delivery and memory*. Untuk perspektif invention (penemuan), mengacu kepada konseptualisasi dan proses menentukan makna dari symbol melalui interpretasi dan

respons terhadap fakta atau realitas. Arrangement (penyusunan), pengaturan symbol simbol menyusun informasi dalam hubungannya Siantar orang-orang simbol-simbol dan konteks yang terkait. Style (gaya), berhubungan dengan semua anggapan yang terkait dengan penyajian dari semua symbol. Delivery (penyampaian), perwujudan dari simbol-simbol dalam bentuk; fisik, nonverbal, berbicara, menulis dan media pesan. Terakhir, memory (daya ingat), acuannya bukan lagi menghafal pidato, tetapi cakupan sudah pada tahap menyimpan dan mengolah informasi.

Grand theory yang dibahas sebelumnya akan menjadi cakupan pembahasan teori utama dalam memetakan *Public speaking* dengan objek penelitian para anggota dewan Kota Makassar. Dan , termasuk karya terbesar teori retorika yang banyak dikutip dari berbagai disiplin ilmu, utama disiplin ilmu komunikasi dan menjadikan teori utama dalam menjelaskan dan menagalisis praktisi-praktik retorika yang dilakukan aktor-aktor politik (komunikator politik) yang ada dilembaga wakil rakyat, khusus anggota DPRD Kota Makassar.

Bahasa dan Ideologi dalam Retorika Politik

Maka bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi dapat juga dimaknai sebagai representasi budaya berupa pandangan politik dan ideologi dari kelompok tertentu. Sebagai representasi budaya, bahasa yang sama bisa memiliki makna berbeda. Bahkan, tidak sedikit orang yang anti dan tidak menggunakan bahasa tertentu sebagai representasi budaya yang tidak disukainya. Atau sebaliknya, banyak orang yang cenderung suka menggunakan bahasa dari budaya tertentu yang disukainya.

Dalam panggung politik praktis, bahasa juga menjadi cermin ideologi. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ideologi membentuk dan dibentuk oleh bahasa. Melalui ideologi yang memberikan makna pada realitas tertentu dengan menggunakan bahasa tertentu yang dirumuskan melalui sebuah kata dan kalimat, sehingga membentuk realitas tertentu.

Dengan demikian, para elite politik pun sering memproduksi bahasa sendiri untuk memaknai sebuah realitas yang ada. Lalu bahasa yang dicipta dari konsep pandangan ideologinya itu, disebarkan kepada khalayak untuk membentuk satu wacana. Tujuannya tentu untuk mengkonstruksi pandangan khalayak sesuai dengan yang diinginkan para elite politik tersebut. Sehingga tidak salah jika bahasa pun dimaknai sebagai sesuatu yang tidak netral dan malah sarat muatan kepentingan tertentu. Menurut salah seorang ahli antropologi linguistik, Sapir Whorf (dalam Deddy Mulyana, 2005:120), bahasa bukan hanya sekedar deskriptif atau saran untuk melukiskan satu fenomena serta lingkungan. Lebih dari itu, bahasa juga dapat mempengaruhi cara kita melihat lingkungan kita. Pandangan ini kemudian dikembangkan menjadi dua bagian, *deterministik linguistik dan relativistik linguistik*.

Deterministik linguistik memandang, struktur bahasa yang mengendalikan pikiran dan norma-norma budaya. Sedang relativitas linguistik, melihat karakteristik bahasa dan norma budaya saling mempengaruhi. Budaya dikontrol sekaligus mengontrol bahasa. Bahasa juga menyediakan kategori-kategori konseptual yang mempengaruhi bagaimana persepsi para penggunanya

dikode dan disimpan.

Bahasa bukan sekedar alat komunikasi untuk memaknai satu realitas objektif semata. Namun, bahasa juga merupakan kegiatan sosial, bukan sesuatu yang netral dan konsisten, melainkan partisipan sosial yang dapat direkonstruksi, serta di-setting untuk membentuk gagasan dan tindakan seseorang.

Menurut Michel Foucault (1972:216), serta dalam kehidupan nyata, disadari atau tidak, bahwa di dalam bahas terkandung pergulatan dan pertarungan kepentingan ideologis. Sebab dipandang sebagai sesuatu yang tidak netral dan tidak universal, bahasa menjadi terikat oleh waktu, tempat dan konteks pergulatan historis politiknya. Sehingga bahasalah yang melahirkan wacana atau discourse sebagai sesuatu yang niscaya bersifat politik.

Dalam alur pikir tersebut, bahasa tak pernah dapat dipisahkan dari sebuah kekuasaan politik. Amerika Serikat sebagai negara yang menganggap paling demokratis dan humanis, para elite politiknya juga kerap menciptakan bahasa sedimentasi negatif yang disusun dan dirumuskan melalui sebuah kata atau terminologi; sebut saja, misal “teroris”, “kaum fundamentalis”, dan “poros setan”. Semua istilah tersebut diciptakan dan disebarluaskan secara masif. Tentu, bermuatan politik dan berusaha agar Amerika tetap menjadi pihak yang dominan.

Begitu juga pada zaman rezim otoriter Orde Baru. Presiden Soeharto selalu memproduksi bahasa tertentu untuk memaknai realitas tertentu. Seperti terminologi Gerakan Pengacau keamanan (lazim disingkat GPK), Organisasi Tanpa

Bentuk (OTB), PKI Gaya Baru, ekstrem kanan dan ekstrem kiri yang sengaja diciptakan serta digunakan untuk mendistorsi gerakan posisi.

Bahasa memang dunia simbol yang paling nyata. Sehingga siapapun yang ingin berhasil merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, harus memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan bahasa-bahasa tertentu. Tak terkecuali para elite politik yang sedang berusaha memobilisasi massa dalam kampanye politik. Agar dapat berhasil merebut hati dan simpati masyarakat, mereka juga tentu memproduksi bahasa. Memiliki kemampuan untuk mengemas bahasa sesuai dengan konteks dan waktu.

Bahasa menunjukkan bangsa. Identitas dan Citra diri seseorang di mata orang lain pun dipengaruhi oleh bagaimana cara berkomunikasi. Selain itu, juga pemilihan kata, istilah, serta intonasi tekanan suara. Semua akan dapat mencerminkan identitas dan Citra diri seseorang yang sedang bicara.

Namun, sebagaimana sebuah bahasa yang juga mengenal konteks dan waktu, agar menarik gaya komunikasi juga harus mengikuti selera masyarakat yang selalu mengalami perubahan dari konteks waktu ke waktu. Termasuk gaya dalam komunikasi politik. Presiden Soekarno dikenal sebagai orator, Bung Karno tidak pernah mengalami kekeringan kata dan istilah. Gaya bicaranya yang berapi-ap, mampu membangkitkan gairah orang untuk datang dan mendengarkan. Banyak orang yang sering kali datang dari tempat yang jauh hanya sekedar untuk mendengar Bung Karno berpidato.

Mereka datang ke alun-alun bukan bukan untuk menerima ajarannya, tetapi semata-mata karena gaya retorika Bung Karno yang memukau (Hendra Kusuma, 2008:78)

Namun, dalam konteks sekarang, orang yang menggunakan gaya bicara mirip Bung Karno, bisa jadi tampak aneh dan tidak menarik bagi masyarakat. Begitu juga pada zaman Orde Baru, kita sering menyaksikan para pejabat yang meniru gaya biar Soeharto yang selalu menggunakan kata “ken” yang kata kerja yang berakhiran “kan”. Tetapi, setelah reformasi dan Soeharto tumbang, para pejabat tinggi negara yang masih menirukan gaya bicara (dialek) Soeharto makin menyusut kuantitasnya. Mungkin mereka takut atau khawatir dicap sebagai antek Soeharto jika masih melafalkan akhiran “ken”.

Secara teoritik, Edward T.Hall (dalam Deddy Mulyana,2005:129-156), dalam konteks budaya menyebut gaya komunikasi dapat dibedakan ke dalam bentuk gaya komunikasi konteks rendah. Gaya bicara dalam komunikasi konteks tinggi ini, orang lebih suka berbicara secara implisit, tidak langsung dan suka basa-basi. Salah satu tujuannya, untuk memelihara keselarasan dan tidak ingin berkonfrontasi. Dengan kata lain, agar tidak mudah menyinggung perasaan orang lain. Komunikasi budaya konteks tinggi, cenderung lebih tertutup dan mudah curiga terhadap pendatang baru atau orang asing.

Bila ingin berhasil merebut hati dan simpatik calon pemilih dalam kampanye politik, seorang tokoh politik tentu harus memperhatikan hal tersebut. Sehingga gaya komunikasinya efektif dan tepat mengenai sasaran sesuai dengan yang diinginkannya

sebagai komunikator. Menurut Deddy Mulyana (2005:149), gaya komunikasi efektif merupakan perpaduan antara sisi-sisi positif komunikasi tinggi dan komunikasi konteks rendah yang ditandai dengan ketulusan, kejernihan, keterbukaan, keterusterangan, kesederhanaan dan kesantunan dalam berbicara.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2010-April 2010. Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif sehingga dapat diketahui kemampuan public speaking DPRD Kota Makassar.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek yang menjadi sumber data dimana semua anggota DPRD Kota Makassar berjumlah 50 orang. Sampel dalam penelitian ini merupakan sampel jenuh. Dimana jumlah dalam sampel penelitian ini adalah 50 orang anggota DPRD Kota Makassar atau seluruh jumlah populasi dijadikan sampel. Teknik sampel yang digunakan adalah puposive sampling yaitu seluruh populasi akan dijadikan sampel dalam penelitian atau mereka yang mengetahui secara langsung tentang kemampuan public speaking DPRD Kota Makassar.

Dalam penelitian ini, jenis peneliti yang digunakan adalah metode survey yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap satu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang

kemampuan *Public speaking* anggota DPRD Kota Makassar.

Penggunaan metode penelitian ini dianggap sangat relevan dengan materi penulisan skripsi, karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode survey guna memperoleh data yang obyektif dan valid dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada.

Variabel penelitian ini adalah kemampuan *Public speaking* anggota DPRD Kota Makassar. Untuk mengetahui variabel penelitian maka variabel yang digunakan adalah kemampuan, keterampilan dan sikap. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini digunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif dengan bantuan tabel frekuensi dan analisis persentase (Singarimbun dan Efendy, 1995:272).

Adapun rumus yang digunakan dalam menganalisis data melalui tabel frekuensi adalah :

$$\begin{aligned} \text{Nilai} &= \text{Bobot} \times \text{frekuensi} \\ \text{Rata-rata} &= \frac{\sum \text{nilai}}{N} \\ &= \frac{\text{Rata-rata skor}}{\text{persen}} \\ \text{Rata-rata} &= \frac{\text{Rata-rata skor}}{\text{persen}} \times 100\% \end{aligned}$$

Banyaknya Klasifikasi Jawaban

Selain tabel frekuensi analisis data dilakukan dengan menggunakan skala likert. Untuk memudahkan analisis maka pertanyaan yang diajukan kepada responden

diberi gradasi dengan beberapa item jawaban. Item-item pertanyaan akan diberikan skor dimulai dari nilai tertinggi dengan skor 4 hingga terendah skor 1 (Sugiyono, 2003:107). Klasifikasi sebutan dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan sesuai dengan persepsi responden.

Selanjutnya rekapitulasi sore dibuat berdasarkan interval nilai persentase sebagai berikut :

1%	-	25%	sangat tidak baik
26%	-	50%	kurang baik
51%	-	75%	baik
76%	-	100%	sangat baik

Kriteria efektif dari jawaban responden ditentukan apabila berada pada hasil persentase antara 75 sampai dengan 100%.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Public speaking adalah kegiatan berbicara di depan umum. Tujuannya adalah menyatakan pikiran, pendapat ide, dan gagasan atau guna memberikan gambaran tentang suatu hal. *Public speaking* atau Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk membangun opini, mengkomunikasikan kebijakan, memprovokasi massa, menjual produk, meyakinkan klien, memberikan informasi dan lain-lain.

Dalam penelitian ini indicator kemampuan *Public speakin* anggota DPRD Kota Makassar, penulis analisis melalui pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dalam melakukan aktivitas komunikasi public.

1. Analisis Pengetahuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman sebagai incumbent, pengalaman sebagai kader partai dan organisator serta kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar dan workshop yang telah diikuti oleh legislator Makassar menjadikan sebagian legislator cukup mampu melakukan kegiatan *Public speaking* sekalipun standar retorika dari sebagian anggota dewan masih perlu dioptimalkan.

Hal ini terlihat sebagian dari informan belum memperlihatkan cara dan gaya berbicara yang memukai dan mengagumkan. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan anggota dewan belum pernah pelatihan khusus mengenai pelatihan *Public speaking*, padahal kegiatan ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbicara di depan public.

Data yang didapatkan dari lapangan ditemukan bahwa berdasarkan tabulasi tingkat keaktifan anggota dewan dalam hal *Public speaking* berdasarkan risalat rapat terhitung Mei 1009 s/d 2010 ditemukan bahwa hanya 12 orang yang aktif berbicara selama rapat komisi dan rapat paripurna. Lengkapnya data tersebut terlihat dari table 4.1 dari berbagai partai yang ada di DPRD Makassar. Lebih mengejutkan ada 3 orang anggota dewan yang aktif berbicara, itu pun karena status sebagai ketua dan wakil ketua fraksi.

Dari data tersebut terungkap keaktifan anggota dewan, pada umumnya legislator cenderung pasif dalam memperjuangkan aspirasi data kepentingan rakyat. Dominasi pembicara atau berpidato dan berdebat

karena status structural politik yang melekat pada dirinya.

Sebenarnya, dari pengamatan dan hasil wawancara terbukti, para anggota cenderung pasif, karena factor pengetahuan berbicara di depan public. Data-data akurat terhadap frekuensi pembicaraan menjadi bukti otentik bahwa akibat keterbatasan teknik berbicara dan berdebatnya sehingga kontestasi pidato yidak hidup, berkualitas, apalagi professional. Padahal sebagai politisi, *Public speaking* merupakan modal dasar untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Terlebih lagi, kurang memadainya kemampuan *Public speaking*, maka figure yang terpublikasikan dan menaikkan jati diri dalam komunikasi organisasi (rapat di DPRD) maupun publikasi figure di media massa hanya yang mampu melakukan komunikasi public baik dalam bentuk berbicara dalam rapat maupun dalam publikasi media (image).

Temukan lain yang ditemukan dalam penelitian ini, adalah rendahnya pengetahuan kemampuan public, sehingga gambaran realitas media terhadap sosok legislator yang termuat dalam berita media adalah tokoh-tokoh politik legislator DPRD Makassar yang dikutip oleh media massa yang menjadi news maker.

Komposisi analisis pengetahuan dapat dilihat pada table 1.

2 Analisis Keterampilan

Dari analisis data tentang keterampilan selama penelitian menunjukkan beberapa factor diantaranya : penguasaan bahasa dan perbendaharaan kata sangat dibutuhkan karena untuk menjadi pembicara yang baik

dan handal diperukan kosa kata dan penguasaan bahasa dari para legislator. Penggunaan bahasa tubuh (body language) : ekspresi wajah (facial expression), gerakan tangan (hand move), gerakan (body movement), dan kekuatan suara (golden voice) sangat menentukan 38% memberikan kontribusi dahsyat dalam public speaking. Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat survey di lapangan menunjukkan 12 informan dan beberapa legislator lainnya yang diamati, ternyata bahasa yang digunakan menggunakan tekanan suara yang terkesan kasar, ekspresi waja yang tidak ramah (ekspresi professional), monoton dan tegang. Penggunaan bahasa oral masih mengandung dialek yang merusak tata bahasa Indonesia dan menimbulkan pencitraan buruk bagi institusi ini.

Temuan lainnya adalah, dalam pengamatan peneliti terlihat pada saat debat ada kecenderungan mempertahankan ide dan gagasannya, defens, pressure, dan terlihat emosional dan sepatasnya tidak melakukan hal tersebut.

Hasil dokumentasi didapatkan bahwa penggunaan bahasa oleh anggota Legislatif Kota Makassar pada saat sidang terdapat beberapa ungkapan-ungkapan yang dilontarkan tidak sebaiknya keluar dari mulut seorang anggota dewan. Misalnya, ketika Fraksi dari Golkar (NM) menilai bahwa pembangunan pariwisata di Kota Makassar menyatakan ‘... kaya tong ini Kota Makassar sangat jorok sekali...’ atau ‘... Anda telah melakukan pelecehan buat kami dalam undangan....’

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Anggota DPRD Kota

Makassar menciptakan “idiom-idiom” politis yang terasa ringan untuk diucapkan, tapi kurang baik diucapkan di tempat resmi seperti sidang dengar pendapat.

Masih berkaitan dengan keterampilan, kemampuan membuat humor akan sangat membantu untuk merebut hati audience dan keluar dari krisis. Seorang pembicara, kecuali pelawak, tidak diharapkan untuk membuat audiencenya tertawa terpingkal-pingkal. Namun demikian, kemampuan untuk membuat mereka tersenyum kemudian memberikan applause merih sangat membantu untuk mengurangi ketegangan dan kebosanan. Keterampilan semacam itu, beberapa dari anggota dewan kurang rileks, sehingga rapat biasa tegang dan kaku.

Temuan lainnya dalam penelitian ini adalah aspek konteks pembicara yang terdiri dari : posture, gesture dan kontak mata. Dalam hubungannya dengan penggunaan bahasa tubuh oleh anggota legislative Kota Makassar mengindikasikan lebih banyak digunakan sebagai penguat arti makna emosional atau nada suara yang tinggi (kemarahan) terutama pada:

- Rapat dengar pendapat dengan masyarakat untuk membahas kepentingan kadangkala masyarakat mempertahankan keinginannya dan hal tersebut tidak sesuai dengan aturan, seperti rapat dengan pedagan kaki lima.
- Pada saat pembahasan anggaran dengan SKPD kadangkala ada hal-hal yang menyalahi aturan yang dilakukan SKPD, misalnya anggaran makan minum berulang dan

dimasukkan di kegiatan yang lain dengan tujuan yang sama begitupun pengadaan barang.

- Pada saat kepentingan fraksi misalnya badan masyawarah menentukan jadwal paripurna bisa terjadi tarik menarik kepentingan kadangkala ada fraksi yang belum selesai pembahasan tetapi badan masyawarah sudah menentukan jadwal paripurna.

No.	Ciri Karakter Pengetahuan	Bukti Kondisi
1	Kurang Profesional	Penggunaan bahasa tubuh, diksi, dan kekuatan suara yang memikat
2	Terbatas Teknik Berbicara	High profile dalam berbicara, pidato tidak hidup & penyampaian tidak profesional
3	High Profile	Citra pengetahuan tidak mencerminkan penyalur aspirasi rakyat yang memiliki kemampuan public speaking professional

Sumber: Hasil analisis penulis

Adanya tampilan emosional yang dilakukan anggota dewan terkadang melahirkan debat kusir dalam menemukan pendapat dan hal-hal yang menyangkut kepentingan partai, fraksi maupun kepentingan public atau rakyat.

Dalam panggung politik urgensi penggunaan bahasa, hasil dokumentasi didapatkan bahwa anggota legislative Kota Makassar pada saat sidang terdapat beberapa ungkapan-ungkapan yang dilontarkan seorang anggota dewan. Misalnya, ketika fraksi dari Golkar NM menilai bahwa pembangunan pariwisata di Kota Makassar menyatakan ‘... kaya tong ini Kota Makassar sangat jorok sekali...’ atau “ Anda telah melakukan pelecehan buat kami dlaam undangan....”.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Anggota DPRD Kota Makassar menciptakan “idiom-idiom” politis yang terasa ringan untuk diucapkan, tapi kurang baik diucapkan di tempat resmi seperti sidang dengar pendapat.

Dalam hal ini, strategi kesantunan yang digunakan anggota dewan dengan menerapkan strategi terus terang tanpa basa-basi (on record without redressive ation). Maka wajar saja, penggunaan bahasa yang dianggap kurang santun biasanya mendapat kecaman dalam proses umpan balik peserta sidang dewan baik secara verbal dan nonverbal.

Aspek lain yang ditemukan peneliti di lapangan yaitu pada saat Sidang penetapan Pansus Anggaran yang dilakukan di gedung DPRD Kota Makassar telah memperjelas

kemampuan public speaking anggota DPRD Kota Makassar.

Pada sidang Penetapan Pansus Anggaran, terjadi silang pendapat antara anggota dewan khususnya antara A dari PPP dengan B dari Golkar. Adapun kutipan ungkapan yang dilontarkan adalah:

A = Tolong jangan ditutup dulu.....

B = (dipotong pembicaraanya) kan sudah tadi dibahas

A = saya mau liat anunya.

Bahasa merupakan perkataan-perkataan yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai aturan-aturan tertentu yang disesuaikan dengan situasi yang menggunakannya. Perilaku berbahasa seseorang dapat dijadikan tolok ukur keberadaan suatu bangsa. Pepatah mengatakan bahasa adalah cerminan pribadi seseorang, karena melalui tutur kata kita dapat menilai pribadi seseorang.

Tutur kata yang baik, lemah lembut dan sopan-santun yang dilakukan seseorang mencerminkan sebagai pribadi yang baik dan berbudi. Sebaliknya, apabila perkataan seseorang buruk, maka citra buruklah yang akan melekat kepada pribadi orang tersebut. Kenapa demikian? Karena bahasa juga dapat menjadi alat kekerasan verbal yang terwujud dalam tutur kata seperti memaki, menfitnah, menghasut, menghina dan lain sebagainya. Hal itu akan berdampak negative terhadap perilaku seseorang seperti permusuhan, perkelahian, aksi anarkisme, provokasi, dan sebagainya.

Kemudian pada sesi selanjutnya, mengenai

proporsi anggota Pansus yang masuk dalam pansus besar dan kecil. Terjadi lagi dialog yang menegangkan sebagai berikut.

A = jangan sepihak (dengan nada tinggi)

B = bukan sepihak

A = tunggu dulu pa ketua, masa dikurangi siapa yang suruh, saya tidak setuju dengan pendapat saudara "B"

C = seandainya susul D dipaksakan saya bubar berhenti jadi anggota dewan.

Dalam sidang tersebut, salahs atu anggota dewan (B) melontarkan pernyataan sambil berdiri dan kemudian dilanjutkan dengan duduk sambil merokok. Mungkin ini yang membuat salah satu (A) merasa terlecehkan, dan mengeluarkan statamen terakhir tadi.

Intonasi suara ialah isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama suara sehingga penerima dapat memahami sesuatu di balik apa yang diucapkannya. Melalui tekanan bisa dinilai apakah seseorang itu marah atau tidak. Apakah ia membujuk karena menginginkan sesuatu, atau ia hanya berpura-pura sekedar untuk menjaga hubungan kemanusiaan.

Hasil pengamatan penulis menunjukkan, penggunaan intonasi suara yang kurang meyakinkan, bahkan sebagian dari mereka masih melafalkan kata yang tidak lengkap bahkan terkesan lebih, seperti misalnya kata "jangan" diucapkan "jangang", atau kata "bukan" diucapkan "bukang", "latihan" diucapkan "latihang", "berenam" diucapkan "berenang" sehingga kedengarannya kurang baik dan memberikan pencitraan buruk bagi yang bersangkutan.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa gaya komunikasi seseorang juga memungkiri

bahwa gaya komunikasi seseorang juga dipengaruhi oleh faktor budaya, akan tetapi dalam bentuk komunikasi formal apalagi jika jenis informasi yang akan disampaikan adalah bersifat persuasif (mempengaruhi khalayak) maka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Panggung politik di DPRD Kota Makassar adalah arena pertarungan dengan bahasa karena bahasa membuka ruang untuk melakukan pertarungan politik. Dengan bahasa, anggota DPRD dapat menunjukkan kekuatan mereka atas pejabat eksekutif. Dengan bahasa, anggota legislatif akan dapat menunjukkan kepada public tentang perilaku mereka sendiri dan juga tingkat kecerdasan untuk mendapatkan informasi.

Namun, pertarungan dengan bahasa itu tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya, karena masing-masing pihak memiliki citra yang harus dijaga. Dalam kasus siding penetapan pansus anggaran DPRD Kota Makassar tampak jelas bahwa seorang anggota dewan menjadi pembicara egois dan sekaligus pembicara yang tidak menghargai orang lain (ditandai dengan berdiri dan merokok).

Di sinilah pentingnya strategi ber-bicara untuk menjaga muka seperti yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson (1987). Pemilihan strategi itu sangat bergantung pada situasi. Santun tidaknya seseorang sangat bergantung pada tepat tidaknya pemilihan strategi ketika melakukan. Tiap situasi membutuhkan strategi yang berbeda. Hukum itu juga berlaku bagi para anggota dewan ketika berbicara. Meskipun bahasa politik hidup di panggung politik, pengguna bahasa politik, termasuk anggota dewan tidak kebal atas aturan main berbahasa tersebut.

Layaknya sebuah permainan, dunia politik adalah dunia adu strategi, salah satunya adu strategi dengan menggunakan bahasa. Hanya petarung dengan strategi yang tepatlah yang akan memenangkan pertarungan. Petarung seperti itu dikendalikan oleh rasio, tidak asal “tabrak sana tabrak sini.” Sekarang kita bisa melihat, apakah anggota DPRD Kota Makassar di arena pertarungan dengan pendapat itu menggunakan strategi yang tepat atau tidak ?

Dengan bahasa seseorang bisa membuat pencitraan diri dan dengan citra diri yang baik seseorang bisa menjaga kehormatannya. Masihkah kita akan menyebut “anggota dewan terhormat” kalau mereka sendiri mengetahui cara menjaga kehormatannya melalui cara mereka berbahasa ?

Lunturnya etika komunikasi di rapat-rapat pansus yang disiarkan secara langsung kepada publik, bisa menjadi satu di antara variable munculnya pelanggaran harapan. Meminjam asumsi teori pelanggaran harapan (*expectancy violation theory*) dari Judee Burgoon yang menyatakan bahwa ketika norma-norma komunikasi dilanggar, maka pelanggaran tersebut dapat dipandang positif atau negative tergantung pada persepsi si penerima. Valensi menurut Burgoon dan Hale dalam *Nonverbal Expectancy Violations* (1998) melibatkan pemahaman atas pelanggaran melalui interpretasi dan evaluasi.

Jika kita mengikuti berbagai suara public yang terekam di media massa, milis group, dan situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twit-ter, maka tentu kita akan bisa menangkap jelas bahwa telah muncul

velensi pelanggaran (*violation valance*) berbentuk interpretasi dan evaluasi negatif terhadap etika komunikasi yang dipraktikkan sebagian anggota DPR maupun DPRD dalam rapat atau sidang.

Contoh kasus pada pada saat rapat dengar pendapat dalam peningkatan industri pariwisata di Kota Makassar, sebagai pembicara terdapat unsur akademisi (dosen dan unsur pemerintah Kota Makassar). Sebagai akibatnya sebagian besar anggota dewan nampak kukuk, kurang percaya diri bahkan tak mampu mengembangkannya forum yang biasanya “galak. Ini bukan sekedar kalah jam terbang, tetapi lebih pada kebiasaan pansus untuk menempatkan diri mereka sebagai komunikator yang superior. Akibatnya, kerap kali mereka lalai bahwa kecerdasan forum tidak tercermin dari “kengongotan” melainkan dari kedalaman elaborasi. Proses sidang atau rapat di DPRD yang mengindahkan etika komunikasi, akan menjadi pendidikan politik bagi public.

Sidang dengar pendapat dengan pedagang asongan yang dilakukan di gedung DPRD Kota Makassar telah memperjelas kemampuan public speaking anggota DPRD yang mulai terperangkap dengan pencitraan negatif. Salah satunya dengan menampilkan kesan yang tidak santun dalam berbicara atau berpidato. Keseluruhan deskripsi kondisi di atas dapat dilihat pada tabel 2 analisis keterampilan pada halaman selanjutnya.

3. Analisis Kepribadian

Kepribadian dalam bentuk Sikap dan perilaku adalah merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup

terhadap suatu stimulus atau objek. Setiap tindakan selalu diawali oleh proses yang cukup kompleks, sebagai titik awal penerimaan suatu stimulus, sementara dalam diri individu terjadi dinamika berbagai psikologis, seperti kebutuhan, perasaan, perhatian dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan tentang kepribadian dalam bentuk sikap dan perilaku bahwa sensitivitas komunikasi yang tinggi di antara anggota Dewan berhubungan dengan kepentingan dibalik eksistensi mereka dan kepentingan kedua partai besar (Partai Golkar dan Partai Demokrat) yang berusaha untuk melindungi kepentingan kelompoknya.

Berkaca dari kejadian politik di dewan, para anggota dewan kurang pandai-pandai menjaga etika komunikasi yang santun baik dalam persidangan maupun sewaktu berbicara di depan publik. Sebagai contoh, misalnya, anggota dewan sikapnya selama bersidang ada yang merokok, berhandphone-ria, SMS-an, dan tidak memperhatikan narasumber (Pemerintah Kota) yang tidak sepatutnya berperilaku inkonsisten dalam bersidang.

Dalam konteks etika komunikasi politik, dari sinilah kedewasaan para politisi diuji, mereka harus mendahulukan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang strategis dibandingkan kepentingan partai politik. Perlu diingat diujung lidah para anggota dewan sesungguhnya terletak harkat dan martabat bangsa.

Maka data penelitian menunjukkan bahwa bahwa sikap santun dan perilaku dalam berkomunikasi anggota DPRD Kota Makassar masih kurang menghargai etika politik. Hal ini bisa terlihat pada saat

melakukan sidang atau rapat masih sering keluar kata-kata yang kurang baik.

Beberapa situasi terjadi perang mulut antara politis. Kata kasar, memang kerap keluar tanpa disadari oleh para anggota dewan, terutama saat emosi tak terkontrol serta karena ekspresi berlebihan. Tapi jika perkataan kasar tersebut mulai sering keluar dari mulut seseorang, maka masalahnya ada pada karakter orang tersebut. Pada hal, K. Berten mengartikan seorang filosof etika dalam tiga pengertian, yaitu : 1). Etika adalah nilai-nilai seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya., 2). Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral (yang dimaksud seperti kode etik). 3). Etika adalah ilmu mengenai kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk). Ahli etika lainnya yaitu Frans Magnis Suseno menyatakan, etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia (manusia) harus hidup kalau mau menjadi baik.

Berdasarkan pengertian etika diatas, pertimbangan etika sebagai pertimbangan kesadaran akal budi yang posisinya paling tinggi seharusnya kata-kata kasar yang dicontohkan oleh anggota dewan tidak akan pernah terjadi karena itu bukanlah cara dan perilaku anggota dewan yang pada dasarnya sudah dipilih secara langsung dalam proses pemilu yang lalu. Anggota-anggota dewan yang terpilih harus dapat mencerminkan kualitas moral, etika dan perilaku mereka sebagai anggota DPRD yang layak mewakilkan rakyat.

Dalam praktiknya, sejumlah indikasi mengarah kuat pada minimnya

penghormatan terhadap etika berkomunikasi anggota dewan, hal ini terlihat jelas dari pengamatan peneliti, karena proses produksi pesan verbal dan nonverbal yang tidak relevan bahkan kontra produktif dengan kehormatan anggota dewan. Temuan lain menunjukkan tugas dan fungsi anggota dewan di era keterbukaan dan “kebebasan” cenderung “kebablasan”. Misalnya, kata-kata yang bernuansa bentakan dan hardikan kata-kata diluar subansi persoalan, membuat kita terperanjat dan bertaya, dimanakah letak operadaban anggota legislator. Tidak hanya kata-kata verbal, banyak pula bahasa nonverbal yang “nyiyir”, merendahkan dalam konteks tempat dimana pesan nonverbal itu diproduksi dan didistribusikan kepada khalayak. Deskripsi analisis sikap dan perilaku di atas dapat dilihat pada tabel.

Kesimpulan

Hasil analisis kemampuan *public speaking* anggota Legislator Kota Makassar periode 2009-2014 terpetakan sebagai berikut.

Kemampuan *public speaking* dari factor pengetahuan (knowledge) ditemukan bahwa dari 12 partai ternyata, tingkat pendidikan anggota legislative masih didominasi pendidikan strata sarjan (S1) sekitar 54 persen, disusul kemudian pendidikan Magistern (S2) 28 persen, strata pendidikan diploma 8 persen, dan Sekolah menengah atas (SMA) 10 persen. Dari data pendidikan formal untuk kelompok sarjana S1 dan S2 (sekitar 82 persen), semestinya sangat berkorelasi terhadap tingkat pengetahuan *public speaking*. Namun, data dilapangan yang ditemukan ternyata tingkat pendidikan anggota berbanding terbalik dengan kemampuan pengetahuan berbicara di depan

public. Data dilapangan “ditemukan” tentang tingkat keaktifan berbicara khususnya dalam rapat paripurna tahun 2009-2010 anggota DPRD Kota Makassar ternyata hanya 3 orang yang aktif berbicara dari seluruh anggota dewan yang berjumlah 50 orang dari ketiga anggota dewan tersebut melakukan aktivitas *public speaking* karena factor “kedudukannya” sebagai ketua dan wakil ketua DPRD Kota Makassar. Hal tersebut terjadi dikarenakan mereka harus berbicara mewakili anggota dewan yang hadir dalam forum-forum rapat paripurna. Temuan ini menunjukkan bahwa keberanian, kepercayaan diri dan penguasaan masalah dalam mengemukakan ide dan pendapatnya masih sangat minim. Anggota DPRD Kota Makassar di forum-forum yang sifatnya resmi dan audiens yang heterogen sangat hati-hati berbicara dan memilih lebih banyak “diam” terutama anggota dewan yang kurang memiliki “kemampuan pengetahuan dan keterampilan” berbicara di forum yang dihadiri para pejabat teras dengan jumlah audiens yang relatif besar. Hal yang sangat memperhatikan adalah 3 legislator dari 6 legislator perempuan Kota Makassar (lihat tabel 4.5) dalam rapat paripurna tersebut “tidak pernah” sama sekali berbicara memberikan kontribusi ide, pendapat dan gagasannya, para perempuan dalam kurun waktu setahun dalam rapat tersebut lebih memilih menjadi peserta forum yang pasif. Hal ini menunjukkan bahwa legislator perempuan belum sama sekali memperlihatkan “taringnya” sebagai perwakilan perempuan di panggung politik. Latar belakang pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kepercayaan diri dan

keberanian serta kurang terlatihnya legislator perempuan yang menjadi penyebabnya mereka tidak aktif berbicara dalam forum rapat dan tidak mencerminkan komunikator politik.

Kegiatan *public speaking*, bukanlah hal yang utama dalam upaya membangun citra (image) sebagai wakil rakyat dalam mengfungsikan dan menjalankan fungsinya sebagai articulator politik. Begitu juga soal kemampuan pelatihan dan pengalaman organisasi. Dari aspek pelatihan, dari hasil data ditemukan, para anggota dewan tidak pernah memanfaatkan lembaga-lembaga sekolah *public speaking*, termasuk yang ada di kota Makassar. Sebagian besar anggota dewan senang melaksanakan pelatihan kalau itu dilaksanakan di luar Sulawesi, jika pelatihan tersebut dilaksanakan di dalam Kota Makassar animo sebagian besar anggota dewan tidak tertarik. Jadi wajar saja, pengetahuan retorika dan pengetahuan berkomunikasi di depan public (komunikasi politik) masih perlu ditingkatkan. Dalam aspek pengalaman organisasi politik pada umumnya tidak mendukung menjadi articulator politik yang handal, hal itu tercermin posisi dan kedudukan dalam partai politik di dominasi dari latar belakang penguasaan dan berprofesi sebagai bendahara partai.

2. Dari data yang diperoleh di lapangan kemampuan *public speaking* dari factor keterampilan (skills) diketahui bahwa anggota DPRD Kota Makassar di dalam penguasaan bahasa dipengaruhi pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama ini, adapun penyampaian pesan atau *delivery* dalam pemilihan kata, sebagian legislator cenderung emosional dan nada suara

terkadang meninggi hal tersebut dipengaruhi karakter individu yang temperamental dan sarat kepentingan politik. Penggunaan humor sangat tergantung situasi dan kondisi forum, lontarkan humor disampaikan, misalnya pada saat penerimaan kunjungan kerja anggota DPRD kabupaten/kota di luar provinsi SulSel. Rapat paripurna diwarnai dengan situasi yang sangat formal dan kaku sehingga humor sangat sedikit digunakan. Dari aspek humor yang, para anggota DPRD Kota Makassar sebagian kurang memiliki *sense of humor*. Verbal menyangkut pilihan kata sebagian anggota dewan tidak terstruktur dan penggunaan bahasa dipengaruhi dialek daerah, serta dilakukan berulang-ulang, baik forum resmi maupun tidak resmi.

Kemampuan dari keterampilan menggunakan bahasa nonverbal(bahasa tubuh) seperti ekspresi wajah terkadang begitu “arogan”, terutama dalam perdebatan. Begitu pula cara duduk, cara berdiri, penggunaan ekspresi tangan (*hand move*), peneliti berkesimpulan seharusnya anggota dewan mempunyai pengetahuan tentang bahasa nonverbal, tetapi nampaknya kurang mendapat perhatian (*self controlling*) bahwa lewat bahasa tubuh seseorang dapat terdeteksi *personality* atau kepribadiannya. Termasuk penampilan (*performance*) baik itu cara berpakaian, *harmony color* atau pilihan warna, hanya sebagian dari anggota dewan yang peduli terhadap hal tersebut.

3. Data yang diperoleh dari lapangan dari factor kepribadian anggota DPRD Kota Makassar yang paling banyak mendapat sorotan masyarakat, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kualitatif dewan dianggap kurang memperhatikan sikap dan

perilaku baik dlaam sidang maupun berbicara di depan public. Sikap yang cenderung muncul dalam penampilan retorikanya perlu dioptimalkan. Hal ini terlihat dari sikap anggota dewan dalam menanggapi siu-isu korupsi cenderung menunjukkan sikap yang *defens dan emosional*. Begitu pula oada rapat-rapat komisi dan rapat pertemuan lainnya, sikap duduk yang tidak etis,bersuara tinggi serta merokok, dan sebagian besar anggota dewan kota Makassar, khususnya pria, memiliki kebiasaan pmerokok sambil berkomunikasi di depan forum, ber*handphone* ria(SMS) serta melakukan aktivitas yang terkadang tidak menghargai forum pada saat sidang.

4. Merujuk *grand theory* Aristoteles(dalam Littlejohn dan Foss, 2005) yang mengungkapkan teori retorika : *Invetion, Arrangement, Style, Delivery, dan Memory*. Memperhatikan praktik public speaking/pidato anggota legislative Kota Makassar, dari hal ini pemetaan teori retorika dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan pembicaraan politik dan agenda kerja yang sudah terpolakan berdasarkan bahasa yang bernuansa politis dan sarat bakan kepentingan kelompok atau partai. Dari sudut pandang *invention* konsep dan bahasan *public speaking* berbau *pressure* atau penekanan, sehingga prsen dalam perdebatan tidak elok.

Tabel 2. Analisis Keterampilan *public speaking* Anggota Dewan Kota Makassar Periode 2009/2010

No.	Ciri Karakter Keterampilan	Bukti Kondisi

1	Penguasaan bahasa verbal & nonverbal minim	Penggunaan bahasa oral yang mengandung dialek local dan bahasa tubuh, gerakan tangan, ekspresi wajah, nada suara yang minim & tempremantal
2	Kemampuan humor sangat kurang	Tegang & kaku dalam meramu public speaking
3	Minimnya kematangan tampilan emosional	Senang berdebat kusir dengn menonjolkan self high profile, keterampilan penyampaian pendapat

Sumber: Hasil analisis penulis

Aspek *delivery*, ternyata anggota dewan dalam praktiknya, pembicaraan berbau politis dan kebijakan, baik itu berorientasi kepada kepentingan, diantaranya : kepentingan rakyat, partai, atau kelompoknya. Dari perspektif *arrangement*, nampaknya penganturan symbol-simbol mengandung penaksiran yang berbeda antara retorika baku (bahasa formal) dengan

menggunakan bahasa formal) dengan menggunakan bahasa oral yang dipengaruhi dialek daerah, sehingga pemaknaan dan interpretasi nada suara yang tinggi Karena karakter personal daerah. Hal lainnya yang ditemukan, simbol-simbol intonasi bahasa verbal ternyata sudah merupakan hal yang menyatu dari segi mental dan temperamental bagi politisi yang berasal dari daerah Bugis-Makassar.

Tabel 3. Analisis kepribadian *public speaking* Anggota Dewan Kota Makassar Periode 2009/2010

No.	Ciri Karakter sikap & Perilaku	Bukti Kondisi
1	Sentivitas komunikasi orientasi kepentingan tinggi	Kepentingan kelompok partai dominan disampaikan dalam public speaking dibandingkan kepentingan rakyat
2	Etika komunikasi minim	Etika berkomunikasi dalam bentuk respon terhadap sesama anggota dewan tidak etis, proses produksi bahasa verbal dan nonverbal kontraproduktif dengan sikap

		hormat, dan bentuk sikap negative dalam berbicara mendominasi sikap berbicara (bahasa bentakan)
--	--	---

Sumber: hasil analisis penulis

Begitu juga dari perspektif *memory* berkaitan dengan pengalaman pembelajaran yang tersimpan dalam ingatan dan pada saat disampaikan dalam pesan yang terstruktur, di lapangan ditemukan saya ingat dalam bertutur kata masih dipengaruhi kosa kata daerah dialek daerah. Terakhir adalah syle yaitu gaya bicara anggota dewan baik secara pesan verbal-nonverbal, vokal dan visual masih terpolakan berdasarkan karakter individu diantaranya; “membisu”, temperamental, arogan, dan meyindahkan etika dalam berbicara dan berpendapat.

Daftar Rujukan

Alfian, 1985. *Beberapa Masalah Perubahan Politik Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.

Andrews, Jmaes R. 1987. *Public Speaking*. Macmillan Publishing Company, New York.

Cangara, Hafid.2009 *Komunikasi Politik; Konsep,Teori, dan Strategi* Rajawali,Press Jakarta.

Cipto, Bambang, 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan*

Modern Industrial, Jakarta;Rajawali Press.

Darumurti, Krisna, Uumbu Ruta,2000, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran Dan Pelaksanaan*, Bandung.

Faisal Sanapiah, 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Madang, IKIP Madang.

Forum Rector Indonesia, 2004, *Buku Panduan Pemantauan Pemilu 2004*. Secretariat Forum Rector Indonesia, Bandung.

Hall,Calvin S & Gardner Lindzey, 1993, *Teori-Teori Sifat dan Behavioris-tTk*, Yogyakarta

Hoogerwerf. A, 1983. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Erlangga.

J, Maeleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Koiruddin,2004. *Profil Pemilu 2004 (evaluasi pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislative 2004)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Littlejohn, dan Foss,2005. *Theories Of Human Communication*, Publisiishing Company, Amerika, Mexico.

Malo, Manasse, dan sSri Trisoningratias,1990. *Metode Penelitian Masyarakat*, Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta.

Nimmo, D.1978, *Political Communication and Public Opinion In America*, Santa Monica,cal; Goodyear Publishing Company.

- Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrul (Ed), 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff, 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta; Rajawali Press.
- Sastrodmojo, Sudjono, 1995. *Perilaku Politik*, Semarang; IKIP Semarang Press.
- Sanit, Arbi, 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali
- Soehartono, Irawan, 1999. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Syaukani, Affan Gaffer, Ryas Rasyid. M, 2000. *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Widjaja, A. W. , 1993. *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta. Bumi aksara.
- Widodo, Erna, *Konstruksi Kea rah Penelitian Deskriptif*, Penerbit, Avyrouz,

Jurnal

- Azam awing, peran DPRD Provinsi Riau Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat, *Jurnal Ilmu Politik 8 AIPI dan LIPI*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang dan Peraturan Peundang-undangan

- UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu
- UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD.
- Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
- Keputusan DPRD Kota Makassar Tentang Penetapan Masa Rese I Tahun 2010.